

TUGAS AKHIR

**SISTEM MONITORING TAHUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN YOGYAKARTA**



DISUSUN OLEH :

AMELIA SARI

17001324

AKADEMI MANAJEMEN ADMINISTRASI YPK

YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Sistem Monitoring Tahunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di Dinas Pertanian Yogyakarta

Nama : Amelia Sari

NIM 17001324

Program Studi : Manajemen Administrasi Perkantoran

Tugas Akhir ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir Program Studi
Manajemen Administrasi Akademi Manajemen Administrasi YPK Yogyakarta
pada :

Hari : Senin

Tanggal : 03 Agustus 2020

Mengetahui

Dosen Pembimbing

Anung Pramudyo, S.E., M.M.
NIP. 19780204 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**SISTEM MONITORING TAHUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN YOGYAKARTA**

Laporan Tugas Akhir ini telah diajukan pada Akademi Manajemen Administrasi YPK Yogyakarta untuk memenuhi persyaratan akhir pendidikan Program Studi Manajemen Administrasi.

Disetujui dan disahkan pada:

Hari :

Tanggal :

Tim Penguji

Ketua

Anggota

Endang Hariningsih, S.E., M.Sc.
NIK. 10600105

Dr. Wahyu Eko Prasetyo, S.H.M.M
NIK. 11400117

Mengetahui

Direktur

Anung Pramudyo, S.E., M.M.
NIP. 19780204 200501 1 002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amelia Sari

NIM 17001324

Judul Tugas Akhir : Sistem Monitoring Tahunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah di Dinas Pertanian Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini Merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan oleh pihak manapun kecuali tersebut dalam referensi dan bukan merupakan hasil karya orang lain sebagai manapun secara keseluruhan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ada yang mengklaim bahwa karya ini milik orang lain dan dibenarkan secara hukum, maka saya bersedia dituntut berdasarkan kulum.

Yogyakarta, Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Amelia Sari

NIM. 17001324

MOTTO

“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ” (Qs. Ar Ra’d : 11).

“ Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya ” (An Najm : 39).

“ Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya ditunjukan untuk mencari ridha Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan\kekayaan duniawi maka ia akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat (riwayat abu hurairah raddhiallahuanhu).

“ Dan dari mana saja kamu keluar (datang) maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid Al-Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar – benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu dan Allah sekali – kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. (Q. S. Al-Baqarah : 149).

Dalam setiap pilihan yang kita buat pasti ada baik dan buruknya tapi jangan pernah menyelesaikan pilihan yang sudah diambil karena pasti selalu ada hikmah yang terkandung didalamnya.

Dua hal yang selalu saya lakukan yaitu berusaha berkali – kali serta berdo’a lagi dan lagi (Penulis). Jangan pernah menunggu waktu besok untuk menyelesaikan sesuatu karna waktu tidak akan menunggumu. (Penulis).

Suatu usaha tidak akan selesai tanpa adanya kerja keras dan doa. Saat semua upaya telah dilakukan maka, manusia tinggal menyerahkannya kepada Tuhan.

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya

“ Sujud syukur kepada Allah SWT. Karena rahmat dan hidayah-Nya telah memberikan kekuatan dan ketabahan, membekali dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Tugas Akhir yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu kucurahkan kepada Rasulullah Muhammad SWT ”.

“Saya persembahkan karya sederhana ini untuk Ayah dan ibu tercinta sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita.. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Ayah dan ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian”.

“Untuk adik – adik tercinta, tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian.

“ Terimakasih yang tak terhingga untuk almamater kampus Akademi Manajemen Administrasi YPK Yogyakarta. Dosen-dosen terutama dosen pembimbing yang tak pernah lelah dan sabar memberi bimbingan dan arahannya ”.

“Terimakasih juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan penyelamat disetiap hariku.“Sahabat merupakan sumber cahaya di dalam kegelapan”.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ **Sistem Monitoring Tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas Pertanian Yogyakarta** ” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penulis Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat kelulusan selama menempuh kuliah program DIII di Akademi Manajemen Administrasi YPK Yogyakarta serta untuk memperoleh gelar akademi Ahli Madya (A.Md.).

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu saya, baik secara material maupun moral yang berupa support dan sumbangan pikiran terutama kepada :

1. Allah SWT. Yang senantiasa memberikan kesehatan dan pertolongan serta perlindungan-Nya kepada saya.
2. Bapak Anung Pramudyo, S.E., M. M. selaku Direktur Akademi Manajemen Administrasi YPK Yogyakarta dan Pembimbing Laporan Tugas Akhir.
3. Seluruh jajaran Dosen dan Staff karyawan Akademi Manajemen Administrasi YPK Yogyakarta yang telah memberi berbagai ilmu pengetahuan kepada saya.
4. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar saya yang telah memberikan do'a dan support selama ini baik secara material maupun moral.
5. Para sahabat terdekat dan semua teman – teman di AMA YPK Yogyakarta angkatan 2016 atas perjuangan dan kebersamaan baik dalam perkuliahan maupun organisasi selama kurang lebih tiga tahun ini.

6. Seluruh pihak – pihak yang terkait dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, pengarahan dan kerjasama dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan penulis di masa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK/RINGKASAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Sistem Monitoring	6
B. Fungsi Monitoring	7
C. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	8
D. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	8

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	11
B. Objek Penelitian	11
C. Jenis Data.....	11
D. Teknik Pengambilan Data.....	12
E. Metode Analisa Data	12

BAB IV. GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	
1. Sejarah Berdirinya Kantor Dinas Pertanian	13
2. Visi dan Misi Dinas Pertanian.....	13
3. Struktur Organisasi Kantor Dinas Pertanian	17
4. SDM dan Bagian-Bagian Yang Terkait.....	17
5. Tugas Pokok dan Fungsi.....	18
B. Pembahasan	
1. Pelaksanaan Monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 19	
2. Hasil Monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	20
3. Anggaran Tyang Dikelolala Oleh Dinas Pertanian DIY	21
4. Kendala Yang Ditemukan Dalam Melakukan Monitoring	23

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	24
B. Saran.....	25

DAFTAR FUSTAKA

LAMPIRAN

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian DIY 17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Buku / Dokumen APBD Dinas Pertanian Yogyakarta

Lampiran 2. Contoh Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Gondosuli Nomor 6 Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat proses penyusunan APBD dan Monitoring Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pembuatan Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan fiskal serta mengembangkan koordinasi antar bidang di dalam lingkungan pemerintah daerah sekaligus membantu pemerintah daerah untuk menciptakan efisiensi keadilan di dalam hal menyediakan barang dan juga jasa. Monitoring APBD dilakukan oleh kepegawaian dibagian pemrograman yang memahami konsep, teori, proses serta berpengalaman dalam melaksanakan monitoring. Pelaksanaan dilakukan secara transparan, sehingga pihak yang bersangkutan mengetahui hasilnya dan dapat dilaporkan kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan/ pihak berkewenangan) melalui berbagai cara serta melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif). Monitoring APBD di Dinas Pertanian DIY telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan sudah terlaksana dengan baik walaupun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Sistem Monitoring, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban tersebut setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Maka dari itu pemerintah menerbitkan paket undang-undang bidang keuangan Negara 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Tujuan perencanaan pengeluaran adalah menjamin bahwa suatu keputusan yang menyangkut pengalokasian dana yang terbatas, telah dipertimbangkan prioritas kebutuhan dan akibat yang akan timbul jika dilihat dari perekonomian secara keseluruhan (Kunarjo, 2006:81). Pada prinsipnya perencanaan pengeluaran oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi keinginan seluruh masyarakat. Menurut Suwandi (2000:39) kenyataan saat ini menunjukkan bahwa struktur APBD belum seperti yang diharapkan.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi anomali dalam sistem alokasi pembiayaan daerah. Suatu unit kerja dalam mengajukan usulan kegiatan kurang memperhatikan kenyataan yang sesungguhnya, yaitu dengan memprediksi kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya diperlukan, melainkan berlomba-lomba mengajukan usulan kegiatan sebanyak-banyaknya

dan menganggarkannya melebihi kebutuhan riil. Selain itu usulan kegiatan yang dibuat lebih mendahulukan angka (uang) daripada sasaran kegiatan itu sendiri sehingga kegiatan tersebut kurang layak untuk dilaksanakan dan akibatnya sasaran yang dicapai kurang efektif. Pendekatan *incremental* ini tidak saja kurang menjamin terpenuhinya kebutuhan riil, namun juga bisa mengakibatkan kesalahan yang berkelanjutan.

Hal ini disebabkan karena tidak pernah diketahui apakah pengeluaran periode sebelumnya yang dijadikan tahun dasar penyusunan anggaran tahun bersangkutan telah didasarkan atas kebutuhan yang wajar. Pendekatan *line item* menurut Halim (2001:17) merupakan pendekatan yang paling tradisional adalah perancangan anggaran yang disusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran yang telah ditentukan pada periode sebelumnya. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat mengganti satu atau lebih “item” pengeluaran yang telah ada sekalipun keberadaannya mungkin sudah tidak layak lagi. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka reformasi keuangan daerah secara langsung akan berdampak pada perlunya dilakukan reformasi anggaran daerah.

Reformasi Anggaran atau *budgeting reform* tersebut meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 21 Tahun 2011 tersebut, maka untuk

menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparatibilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti perlu disusun arah dan kebijakan umum APBD yang diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat yang berpedoman pada rencana strategis daerah.

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta mengumpulkan Informasi tersebut untuk menjamin penentuan arah dan kebijakan umum APBD sesuai dengan aspirasi murni (kebutuhan riil) masyarakat, bukan sekedar aspirasi politik.

Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut, maka disusun Strategi dan Prioritas APBD yang selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun usulan kegiatan, program dan anggaran yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja dan dituangkan dalam rencana anggaran satuan kerja dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah. Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa semua pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Kepmendagri tersebut memfokuskan pada penyusunan APBD berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu sistem penganggaran yang lebih mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mencoba untuk membuat sebuah karya tulis berbentuk Tugas Akhir dengan judul “Sistem Monitoring Tahunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem monitoring tahunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam melakukan monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem monitoring tahunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi instansi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan perubahan setiap tahun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang telah disusun selama periode tertentu dan tahun-tahun berikutnya.

2. Bagi AMA YPK Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai tambahan referensi penelitian selanjutnya dalam penyusunan tugas akhir.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memperluas wawasan mengenai sistem penganggaran yang dapat mempermudah pegawai untuk mengetahui bagaimana cara melakukan susunan anggaran dengan jauh lebih baik terkhusus untuk bagian sub program.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sistem Monitoring

Menurut Dunn (2000) kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan anggaran, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi pendapatan belanja daerah.

Menurut Human (2001) menyatakan bahwa secara prinsip, sistem monitoring dilakukan sementara kegiatan yang sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambatan maka segera dibenahi sehingga kegiatan monitoring anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fungsi Monitoring merupakan satu diantara tiga komponen penting lainnya dalam sistem manajemen program, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Tindakan korektif (melalui umpan balik). Sebagai siklus, dia berlangsung secara intens kearah pencapaian target-target antara dan akhirnya tujuan program (Risidi, 2007).

B. Fungsi Monitoring

Monitoring mempunya empat fungsi, yaitu (Dun, 1981) :

1. Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
3. Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
4. Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

C. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang memuat tentang rencana penerimaan, rencana pengeluaran serta rencana pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam hal ini APBD harus memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, serta bagian pendapatan APBD yang digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/investasi (Sahid, 2011).

D. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Merupakan perencanaan daerah jangka pendek yang terdiri dari formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sedangkan perencanaan operasional anggaran tahunan lebih ditekankan pada alokasi sumber daya. APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan dan yang diterapkan di Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut (Darise, 2009). :

1. Akuntansi Keuangan Daerah

Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (pemda).

2. Analisis Laporan Keuangan Daerah

Adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Ada dua aspek penting dalam manajemen keuangan, yaitu :

- a. Money

- b. Information

Selanjutnya, diperlukan aplikasi teknis ini menjadi dasar dalam manajemen keuangan. Dalam hal ini, ada 5 konsep penting yang perlu diketahui, yaitu:

- a. Resiko

- b. Hasil

- c. Diskonto

- d. Dasar Keuangan dan Akuntansi

- e. Aliran Dana dan Perpajakan

Adapun beberapa permasalahan dalam melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapat Dan Belanja Daerah (Rohman, 1998) :

1. Usulan anggaran menggunakan Excel

Masih banyak instansi yang mengandalkan Microsoft Office Excel dalam menyusun perencanaan anggaran.

2. Menyalin anggaran tahun lalu

Hal ini hampir sering terjadi beberapa kali dalam setiap tahunnya, menyalin anggaran tahun lalu dan kemudian menekan nominal sekian persen merupakan jalan pintas untuk menyusun anggaran dengan cepat.

3. Biaya belanja anggaran tidak seragam

Pentingnya penyeragaman biaya (standar biaya) untuk setiap jenis biaya atau belanja adalah untuk mengurangi potensi “kecemburuan sosial” antara unit pengguna anggaran.

4. Pengajuan anggaran terlambat

Penyebab dari keterlambatan dalam pengajuan anggaran bisa dari banyak faktor. Misalnya salah satu karena media pengajuan anggaran yang masih offline.

5. Proses persetujuan yang membutuhkan waktu relatif lama

Proses pengajuan anggaran tidak lepas dari yang namanya “persetujuan” oleh pimpinan. Riview anggaran dari pimpinan sangat penting untuk memastikan para pengguna anggaran tidak mengusulkan anggaran yang tidak sewajarnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus meliputi investigasi kasus yang bisa diartikan sebagai sebuah intensitas maupun objek studi yang dipisah dan terbatas dalam perihal tempat waktu maupun batas-batas fisik sangat krusial untuk dimengerti bahwasanya kasus bisa berbentuk program individu sekolah kegiatan ruang kelas maupun kelompok. Sesudah kasus dimaknai secara jelas maka peneliti melakukan penyelidikan dengan mendalam pada umumnya memakai sejumlah metode pengumpulan data misalnya observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dibahas adalah Laporan Realisasi Program / Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas Pertanian Yogyakarta.

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dan disajikan sesuai informasi yang diperoleh melalui staf kantor dan digunakan ke dalam penelitian ini yaitu wawancara dan diskusi khusus kepada pihak yang berada didalam Kantor Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Data Sekunder yaitu data yang didapat dari karyawan atau staf kantor yang berupa file atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.

D. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari buku dan jurnal yang ada dikantor serta meminta data yang masih kurang.
2. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian tersebut.
3. Wawancara yang dilakukan kepada staf kantor dan dilakukan di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik deskriptif kualitatif dengan langkah mengumpulkan data mengenai Laporan Realisasi Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Menganalisis semua data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melakukan keterangan pengeluaran progres bulan. Data-data tersebut kemudian akan dianalisis untuk menjelaskan atau menggambarkan tentang sistem monitoring tahunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

1. Sejarah Berdirinya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jl. Gondosuli No. 6 tepatnya disebelah Timur Stadion Mandala Krida Yogyakarta, merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan berdasarkan keputusan Gubernur berupa Undang-undang No. 3 Tahun 1950 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 9 Tahun 1955.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung Kepada Gubernur. Kepala Dinas Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Visi dan Misi Dinas Pertanian

Visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY adalah sebagai berikut :

- a. Visi Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta “Mewujudkan Pertanian Tangguh, Berdaya Saing, Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan, Sebagai Penggerak Perekonomian Regional”

Penjelasan dari visi tersebut adalah :

- 1) Pertanian. Pertanian yang dimaksud adalah sistem pengusahaan lahan dan ternak yang pada pokoknya terdiri atas aktivitas budidaya dengan memanfaatkan semua potensi sumberdaya serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Di samping itu aspek pengolahan dan pemasaran produk tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan ternak merupakan aspek-aspek yang perlu diberi penekanan secara simultan. Dengan demikian sistem pertanian yang akan dikembangkan bersifat komprehensif, berwawasan agribisnis, yang meliputi subsistem hulu (*upstream*) yakni industri input atau sarana; subsistem usahatani (*on-farm*), yakni kegiatan yang menggunakan input, sarana dan sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer subsistem pengolahan/hilir (*downstream*), yakni industri yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk antara atau produk akhir subsistem pemasaran (*marketing*), yakni kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik segar maupun olahan, dalam dan luar negeri subsistem jasa, yakni penyediaan data bagi subsistem hulu ke hilir, seperti penelitian dan pengembangan, perkreditan, asuransi, transportasi, penyuluhan, sistem informasi, dan dukungan kebijakan pemerintah.

- 2) Tangguh berarti mampu menghadapi berbagai guncangan, yang dimungkinkan oleh kemandirian petani karena tidak harus tergantung pada faktor-faktor luar. Pertanian tangguh berarti pertanian yang efisien, berbasis pengetahuan dan teknologi, dengan meminimalkan ketergantungan pada input eksternal dan peran pihak luar, melalui penggunaan sarana produksi pertanian secara bijaksana yang bisa menjamin kelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Pertanian tangguh dicirikan oleh kemampuannya dalam penyediaan produk pertanian berkualitas dalam jumlah cukup, mutu terjamin dan berkelanjutan, dan pada saat yang bersamaan terjadi peningkatan kesejahteraan petani.
- 3) Berdayasaing dicirikan antara lain oleh pilihan komoditas dan bentuk ketersediaan berdasarkan orientasi pasar, upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu merebut pangsa pasar dan mengandalkan produktivitas dan nilai tambah melalui pemanfaatan modal, inovasi teknologi serta kreativitas sumberdaya manusia dan bukan lagi mengandalkan kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja tidak terdidik.
- 4) Komersial dimaksudkan sebagai sifat usaha pertanian yang berorientasi bisnis dan berbasis keuntungan (*profit mindedness*), dengan menerapkan teknologi tepat, input eksternal yang rasional, sekaligus input internal berupa sumber daya lokal.
- 5) Potensi lokal adalah seperangkat kekuatan nilai positif dan kearifan

yang dapat digali dari khazanah kultural adiluhung, seperti semangat gotong-royong, hubungan salin memberi dengan alam, dan penyelarasan praktek pertanian dengan perilaku alam.

- 6) Berkelanjutan adalah terus bergerak tanpa berhenti.
- 7) Penggerak perekonomian regional adalah memiliki arti yang penting untuk menggerakkan perekonomian Jawa bagian tengah.

b. Misi

Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencapai tujuan. Pernyataan misi mengandung hal-hal yang harus diemban oleh Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Mengingat pernyataan visi di muka mendasarkan diri pada peran yang bisa dilakukan oleh Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mewujudkan pertanian tangguh, maka misi Dinas perlu mencakup dua sudut pandang, yakni sudut pandang ke dalam (*inward looking*) dan sudut pandang keluar (*outward looking*). Selengkapnya, misi Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan profesionalisme peratur Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta,
- 2) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani, dan
- 3) Mendorong peningkatan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk pertanian melalui peningkatan ketersediaan dan optimasi pemanfaatan sarana/prasarana pertanian daerah, teknologi yang spesifik dan ramah lingkungan.

3. Struktur Organisasi Dinas Pertanian DIY

Bagan Organisasi Dinas Pertanian DIY secara lengkap disajikan dalam gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta

4. SDM dan Bagian – Bagian yang Terkait

a. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas.

b. Subbagian umum

Mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang, efisiensi dan tatalaksana serta keputusan Dinas.

c. Subbagian kepegawaian dan keuangan

Mempunyai tugas mengelola kepegawaian dan keuangan Dinas.

d. Subbagian program dan informasi

Mempunyai tugas menyusun program, mengelola data mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi

5. Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Gubernur Nomor: 38 Tahun 2008 Bab II Pasal 2 Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, sedangkan Fungsi Dinas Pertanian :

- a. Penyusunan program dan pengendalian bidang pertanian
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian
- c. Pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura dan peternakan
- d. Pelaksanaan koordinasi perizinan di bidang pertanian
- e. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya
- f. Pemberian fasilitas penyelenggaraan bidang pertanian kabupaten/kota
- g. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian lintas kabupaten/kota
- h. Pemberdayaan sumber daya pertanian dan mitra kerja di bidang pertanian
- i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Monitoring Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah

Setiap tahun pemerintah daerah melakukan monitoring anggaran dan sekaligus membuat Laporan Realisasi Progam/Kegiatan APBD. Tujuan Monitoring APBD adalah sebagian untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan fiskal serta mengembangkan koordinasi antar bidang di dalam lingkungan pemerintah daerah sekaligus membantu pemerintah daerah untuk menciptakan efisiensi keadilan di dalam hal menyediakan barang dan juga jasa.

Monitoring dilakukan oleh kepegawaian dibagian pemrograman yang memahami konsep, teori, proses serta berpengalaman dalam melaksanakan monitoring. Pelaksanaan dilakukan secara transparan, sehingga pihak yang bersangkutan mengetahui hasilnya dan hasilnya dapat dilaporkan kepada stakeholders (pihak berkepentingan/ pihak berkewenangan) melalui berbagai cara serta melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif).

Aplikasi yang digunakan untuk melakukan setiap kegiatan mulai dari monitoring, laporan anggaran serta progres kerja yang akan dilaksanakan. Aplikasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)

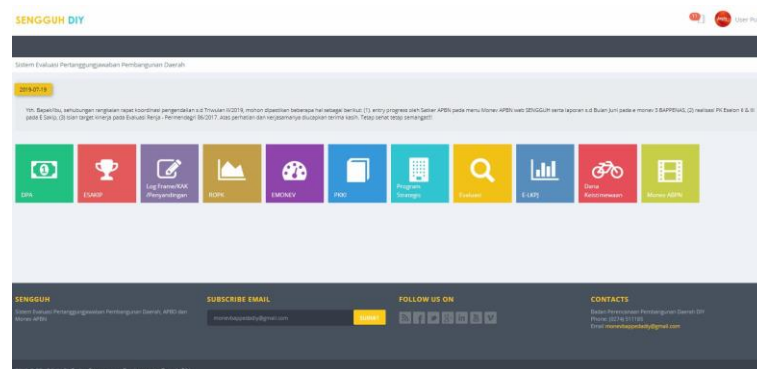
Yaitu sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari Penerimaan Daerah, SPD (Surat Penyediaan Dana), dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Tampilan SIPKD dapat dilihat gambar bawah ini:



Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan SIPKD dilaksanakan dalam rangka membantu memudahkan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan akuntansi dan pelaporan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

b. SENGGUH (Sistem Evaluasi Pertanggung jawaban Pembangunan Daerah) DIY

Yaitu sebuah sistem evaluasi pertanggung jawaban pembangunan daerah yang terdiri dari MONEV APBD (Sistem Monitoring Dan Evaluasi) dan Analisa GAP (Analisa Kebutuhan).Tampilan SENGGUH dapat dilihat gambar dibawah ini:



Tujuan dibuat aplikasi SENGGUH(Sistem Evaluasi Pertanggung jawaban Pembangunan Daerah)antara lain:

- 1) Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya;
- 2) Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter;
- 3) Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup
- 4) Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.
- 5) Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.
- 6) Mewujudkan pelayanan publik.
- 7) Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.
- 8) Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif

2. Hasil Monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Progres Keuangan

Progres keuangan untuk seluruh anggaran belanja yang disediakan sejumlah dana dan yang terserap berapa persen, ketika dana yang diserap tinggi maka semakin bagus penyerapannya.

b. Target

Merupakan disbursement plan atau rencana penyerapan. Diisi lengkap mulai dari B01 (Januari) hingga B12 (Desember). Targetnya mencapai sekian dari yang diperoleh karena ada deviasi di keuangannya.

c. Realisasi

Diisi perbulan sesuai dengan realisasi penyerapan anggaran target biasanya tercapai karena target diubah sesuai dengan realisasinya.

d. Progres Fisik

- 1) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
- 2) Mengelola utang dan piutang.

- 3) Program administrasi perkantoran.
 - 4) Laporan progres dokumen.
 - 5) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.
- e. Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Pembelian secara Elektronik yang disebut E-purchasing menggunakan tata cara pembelian pengadaan barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik atau penyelenggaraan swakelola, untuk waktu penyediaan barang dan jasa hanya waktu tertentu saja karena proses dan penyediaannya memerlukan waktu yang lama, untuk yang mengelola pengadaan barang dan jasa itu sendiri adalah pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

- f. Export Data to Excel

Data-data yang terkumpul kemudian diolah dengan MS Excell untuk dibuat laporannya

3. Anggaran Yang Dikelola Oleh Dinas Pertanian DIY

Anggaran yang sering diterima dan dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari pungutan-pungutan daerah berupa :

- 1) Pajak daerah.
- 2) Retribusi daerah.
- 3) Hasil pengolahan kekayaan daerah.
- 4) Keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah.
- 5) Lain-lain PAD.

b. Dana perimbangan.

Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah, yang meliputi :

1) Dana bagi hasil

Dana bagi hasil yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya alam didaerah oleh pemerintah pusat.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan kemampuan keuangan antara daerah.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional.

c. Pendapatan Lain – Lain yang Sah, meliputi :

- 1) Pendapatan Hibah.
- 2) Pendapatan Dana Darurat.
- 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
- 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.
- 5) Dana Penyesuaian; dan
- 6) Dana Otonomi Khusus.

4. Kendala Yang Ditemukan Dalam Melakukan Monitoring

Ada beberapa permasalahan yang ditemukan dalam melakukan monitoring :

- a. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran.

- b. Pertanggung jawab kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana.
- c. Monev belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja karena harus membuat sistem pengumpulan data saat fase perencanaan proyek atau organisasi.
- d. Rendahnya kualitas data dan informasi sehingga membuat Data tidak ada, atau berbeda antar instansi (SKPD), atau terlambat dlm beberapa tahun.
- e. Rendahnya kualitas diseminasi materi laporan singgah membuat informasi yang sampai sangat kurang
- f. Rendahnya kualitas Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah.
- g. Spesifikasi indikator kinerja dan target kerja masih relatif lemah.
- h. Rendahnya inovasi pendanaan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pembuatan Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan fiskal serta mengembangkan koordinasi antar bidang di dalam lingkungan pemerintah daerah sekaligus membantu pemerintah daerah untuk menciptakan efisiensi keadilan di dalam hal menyediakan barang dan juga jasa.
2. Monitoring APBD dilakukan oleh kepegawaian dibagian pemrograman yang memahami konsep, teori, proses serta berpengalaman dalam melaksanakan monitoring. Pelaksanaan dilakukan secara transparan, sehingga pihak yang bersangkutan mengetahui hasilnya dan dapat dilaporkan kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan/ pihak berkewenangan) melalui berbagai cara serta melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif).
3. Monitoring APBD di Dinas Pertanian DIY telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan sudah terlaksana dengan baik walaupun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

B. Saran

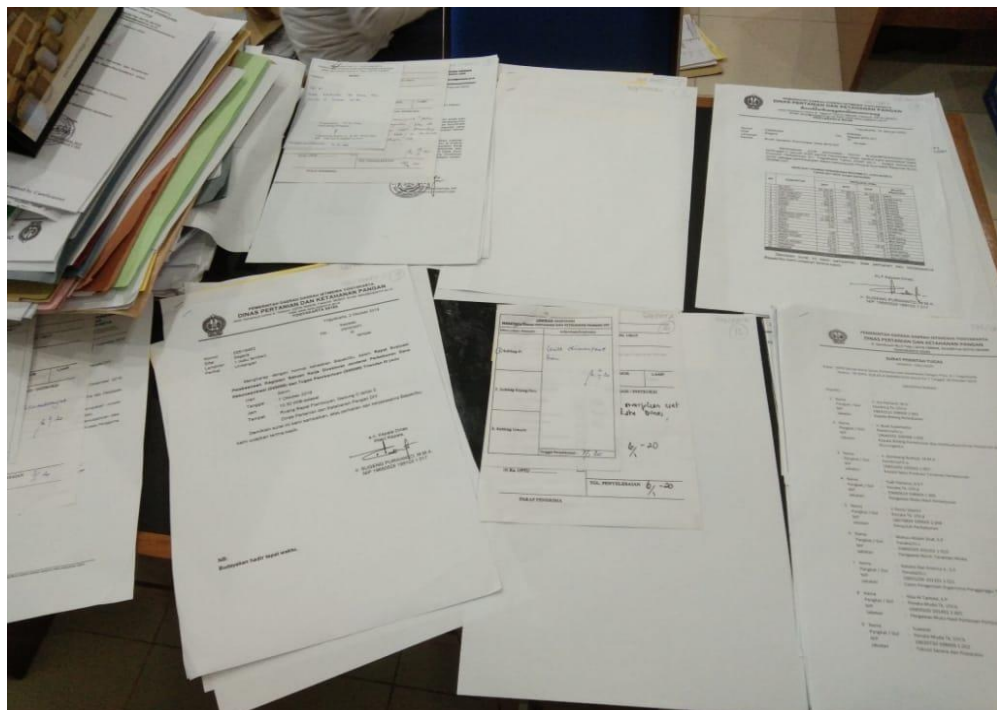
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sebaiknya memberikan laporan setiap pengeluaran atau masuknya anggaran yang diterima dalam setiap bulan.
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sebaiknya meningkatkan sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah mulai dari perencanaan kerja, pembuatan anggaran, pengelolaan anggaran, monitoring, serta pelaporan penggunaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu: Yogyakarta
- Adyatma, Erdi dan Oktaviani, Racmawati.M. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. 4(2). ISSN : 1979-4878. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- Baswir Revrison, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Edisi Ketiga, BPFY Yogyakarta, 1997.
- Handayani, Nur. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. 5(1). ISSN : 2460-0585. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- <http://bpkad.natunakab.go.id/index.php/2014-05-21-00-44-45/64-anggaran/87-pengelolaan-keuangan-daerah-dan-apbd>
- Irham, Fahmi. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung: Alfabeta.
- kampus4u.blogspot.ca (2015, 29 November). *Permasalahan Umum dan Klasik dalam Penyusunan APBD*. Diperoleh 24 Juli 2016.
- M. Nafarin.(2007). *Penganggaran Perusahaan* (3 ed). Jakarta : Salemba Empat.
- Mamesah, D.J, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995

Lampiran 1. Buku / Dokumen APBD Dinas Pertanian Yogyakarta



Lampiran 2. Contoh Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Desember
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Program Kegiatan	Pagu	Fisik		
				Target	Realisasi	Deviasi
1	0.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.700.593.500	100,00	100,00	0,00
1.1	0.00.01.033	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.306.139.700	100,00	100,00	0,00

asi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi	Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
.00	2.700.593.500	100,00	2.463.189.054	91,21	8,79				
.00	1.306.139.700	100,00	1.199.493.532	91,84	8,16	DIY (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY)	Sekretaris - Subbagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran KIR Kendaraan : 1 unit dari 1 unit Pengelolaan naskah dinas : 1 tahun dari 1 tahun Surat keluar : 3000 surat dari 3000 surat Pembayaran Pajak STNK kendaraan roda 2; roda 4 : 129 unit dari 129 unit Surat masuk : 6000 surat dari 6000 surat Majalah : 1 jenis dari 1 jenis ATK : 39 jenis dari 39 jenis Retribusi sampah : 12 bulan dari 12 bulan 	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan naskah dinas Terlaksananya KIR kendaraan operasional barang Terkelolanya surat masuk dan keluar Terbayarnya pajak STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 Tersedianya bahan bacaan berupa majalah dan surat kab Terbayarnya retribusi sampah Termanfaatkannya sarana komunikasi dan penerangan Terpeliharanya kebersihan